



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI RULY DJANGGOLA**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG / JASA**
3. NHK : **486710**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.490.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 506 m2/475 m2 di KOTA PALU ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.765.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/297 m2 di KOTA PALU ,
WARISAN Rp. 1.150.200.000
3. Tanah Seluas 2846 m2 di KOTA PALU , WARISAN Rp.
3.272.900.000
4. Tanah Seluas 2262 m2 di KOTA PALU , WARISAN Rp.
2.601.300.000
5. Tanah Seluas 315 m2 di SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 15000 m2 di BANGGAI, WARISAN Rp.
3.000.000.000
7. Tanah Seluas 632 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 268.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA TRIFOLD UNITED Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA TRIFOLD UNITED Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA TRIFOLD UNITED Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000



5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	616.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.533.123.351
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	20.907.323.351
III. HUTANG	Rp.	24.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	20.882.723.351

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.